

Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dengan telah ditetapkannya tujuan dan sasaran, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yaitu dengan teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threat*), yaitu merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Kurang konsisten dan seringnya berganti dan atau revisi peraturan perundang-undangan mengakibatkan pelaksanaan tugas di daerah sulit mencapai target kinerja dan merupakan hambatan terhadap penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Terbatasnya anggaran, Rendahnya Kompetensi SDM, dan tidak sinkronnya antar peraturan perundang-undangan merupakan hambatan dalam penyusunan bahan perencanaan strategis organisasi;

- c. Terbatasnya dokumen/data/informasi/laporan sebagai bahan penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan;
- d. Sering berubahnya nomenklatur berdampak pada ketidakkonsistenan program/kegiatan sehingga menyulitkan evaluasi capaian kinerja dan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi;
- e. Terbitnya Undang-undang yang tidak disertai dengan aturan pelaksanaan sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis pembinaan pola karier PNS;
- f. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan tugas pokok fungsinya, lemahnya pengembangan inovasi pelayanan dan kurangnya komitmen dalam mengimplementasikan SPM;
- g. Kurangnya kesadaran aparatur untuk melakukan perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani;
- h. Kurangnya pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan;
- i. Rendahnya kesadaran untuk menekan kepentingan-kepentingan yang bersifat ego sektoral dalam pelaksanaan penataan kelembagaan;
- j. Kurang relevan dan/atau sinkronnya antara regulasi dengan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota;
- k. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur mengidentifikasi karakteristik organisasi dan mengimplementasikan ke dalam tugas pokok dan fungsinya;
- l. Lemahnya pemahaman pemangku jabatan terhadap tanggung jawab jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi menjadi salah satu hambatan analisis jabatan;
- m. Lemahnya mekanisme dan/atau sistem pengawasan internal pemerintah;
- n. Kurang terukurnya indikator capaian kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas dokumen LAPKIN;
- o. Potensi kepentingan antara peraturan perundang-undangan dengan kepentingan politik pemerintahan sebagai salah satu masalah terhadap pelaksanaan administrasi dan kebijakan;
- p. Belum terintegrasinya dokumen mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja dan DPA, sehingga seluruh kegiatan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri;
- q. Lemahnya mekanisme koordinasi antar unit kerja berakibat tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan antar unit kerja / SKPD;

Ditinjau dari lingkungan internal, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

- Adanya Political Will dari Gubernur dan DPRD;
- Adanya struktur Organisasi yang jelas;
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
- Kualitas dan kuantitas personil cukup memadai;
- Ketersediaan dana dan fasilitas/Peralatan kantor cukup memadai;
- Eksistensi Biro Pemerintahan yang strategis.

Sebaliknya terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi penghambat atau permasalahan bagi Biro Pemerintahan sehingga perlu diminimalisir supaya menjadi pendukung terwujudnya kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

- Rendahnya Kompetensi Sumberdaya Manusia;
- Belum efektifnya Koordinasi dan Kemitraan;
- Rendahnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan;
- Terbatasnya Data dan Informasi.

Ditinjau dari lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan guna mewujudkan kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

- Pesatnya Perkembangan IPTEK;
- Adanya Otonomi Daerah;
- Motivasi Kerja yang cukup tinggi.
- Pembinaan Kabupaten/Kota;
- Program/kegiatan didukung oleh pemerintah;
- Peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Sebaliknya terdapat beberapa ancaman yang perlu diminimalisir guna mewujudkan kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- Adanya Krisis Multidimensi yang di alami oleh Bangsa Indonesia;

- Kondisi Masyarakat yang semakin kritis;
- Penempatan PNS/pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Pihak luar kurang mengetahui eksistensi Biro Pemerintahan ;
- Lembaga luar sering lebih berkompeten dalam melaksanakan kegiatan internal.

Setelah hasil analisis SWOT dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal (kekuatan/Strengths dan kelemahan/Weaknesses) dan eksternal (peluang/Opportunities dan Ancaman/Threats), maka berdasarkan hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu:

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.
2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan(W) dan Menghindari ancaman(T).

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor SWOT diatas ditetapkan strategi-strategi seperti dibawah ini :

Faktor Internal	(S)Strengths/Kekuatan	(W)Weaknesses/ Kelemahan
	a. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan Kerjasama b. Terdapatnya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Biro Pemerintahan. c. Tersedianya sumber daya manusia, Pegawai sejumlah 46 orang, yang memiliki kemampuan kerja dan semangat kerja yang tinggi. d. Tersedianya sarana prasarana. e. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan. f. Terjalinnnya hubungan yang baik antar instansi dalam mendukung kinerja instansi.	a. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai. b. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai. c. Koordinasi didalam kerjasama antar instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan stake holders belum optimal. d. Pelaksanaan peraturan perundangundangan belum optimal. e. Adanya peraturan bidang pemerintahan dari pusat yang perlu disesuaikan dengan kondisi di Prov Kalteng.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, **Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021**, adalah:

"KALTENG MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS)"

Misi :

- 1** Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 2** Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- 3** Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
- 4** Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
- 5** Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi
- 6** Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
- 7** Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
- 8** Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus Misi :

Program :

- Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup;
- Perbaikan sistem dan akses pendidikan;
- Perbaikan sistem dan akses kesehatan;
- Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informatika;
- Pengembangan infrastruktur pengairan;
- Pengembangan sumber energi untuk masyarakat;
- Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi karkayatan;
- Peningkatan daya saing masyarakat;
- Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi;

- Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.

Permasalahan :

1. Kurangnya penyediaan infrastruktur pembangunan :

- Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan;
- Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kabupaten/kota
- Luas wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit

2. Rendahnya pengembangan ekonomi lokal :

- Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional
- Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan
- Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.
- Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
- Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
- Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM.

- Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
- Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain.

3. Rendahnya kualitas dan keterjangkauan pendidikan

- Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima;
- Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat didaerah pedalaman/terpencil/terpinggir;
- Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga ke pendidikan.

4. Lemahnya penanganan bidang kesejahteraan sosial

- Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi;
- Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan;
- Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular;
- Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenaga kerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5. Rendahnya pengembangan kapasitas biro krasi

- Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah didaerah("kanwil-kanwil") menyebabkan proses koordinasi masih lemah;

- Masih kurangnya peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah;
- Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak kewilayah Indonesia bagian timur;
- Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum;
- Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan;
- Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

6. Kurangnya pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih padatahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah relatif rendah.

3.3 Telaahan Renstra Biro Pemerintahan

Mengacu padatugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kementerian, sebagaimana visinyayang diarahkan untuk membawa Biro

Pemerintahan menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci dalam rangka mewujudkan Setjen Biro Pemerintahan sebagai organisasi yang mampu memberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri adalah :

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governace), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan efektifitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke depan, Partisipasi, dan Penegakan Hukum.

Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan bahwa "*Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*".

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut azas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Mencermati ketiga kata kunci di atas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dimaksud, seluruh unit kerja di lingkungan Setjen harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis tersebut, visi Setjen ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

Mengacu pada Misi Biro Pemerintahan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Biro Pemerintahan untuk lima tahun kedepan, yaitu :

1. Memanfaatkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur;
2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Biro Pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN;
3. Memantapkan produk hukum dan kebijakan Biro Pemerintahan dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanandan akses informasi berbasis *e-government*;
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Biro Pemerintahan secara berkualitas dan memadai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui

pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

3.5 Isu-isu Strategis :

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan SetdaProvinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi:

1. Bagian Pemerintahan Umum :
 - a. Pelaksanaan pra persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum
 - b. Penanganan Sengketa lahan yang ditangani provinsi
 - c. Percepatan penanganan tata batas antar kab/kota dan antar provinsi tetangga
 - d. Penanganan lanjutan toponimi/ruipabumi unsur buatan (jalan)
 - e. Peralatan penunjang perkantoran yang memadai
 - f. Administrasi perkantoran yang baik

2. Bagian Otonomi Daerah :
 - a. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Provinsi Kalteng;
 - b. Pembinaan wilayah dalam pengkodeaan wilayah dan pemekeran wilayah;
 - c. Pendampingan untuk penyusunan LPPD kab/kota untuk menilai indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi;
 - d. Pendampingan untuk penyusunan LKPJ di lingkup skpd Provinsi Kaleng
 - e. Fasilitasi dan koordinasi pengurusan Pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati serta PAW anggota DPRD Prov dan Kab/Kota;
 - f. Fasilitasi pengurusan Pejabat Negara dalam hal cuti kampanye
 - g. Pembentukan Sekretariat Desk Pilkada/Pemilu/Pileg/Pilpres/Pilkada

3. Bagian Hubungan Kerjasama :
 - a. Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dengan instansi, lembaga, dan luar negeri;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pengurusan Pejabat Negara dalam hal Perjalanan dinas dan non dinas ke luar negeri;
 - c. Fasilitasi dan koordinasi kunjungan Pejabat Negara/Kementerian dan

Non kementerian serta ke Prov. Kalteng